DINAMIKA POLITIK ANGGARAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERKAIT PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023

Oleh : Noval Devanda

Dosen Pembimbing : Agus Susanto, S.I.P., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika politik anggaran dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023, khususnya terkait alokasi anggaran untuk perbaikan jalan rusak. Anggaran merupakan aspek krusial dalam kebijakan pemerintah daerah, di mana perumusannya melibatkan berbagai kepentingan politik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses politik anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif dalam penentuan prioritas anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perbaikan infrastruktur jalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam realisasi perbaikan jalan, di mana dana yang dialokasikan sebesar Rp. 51,9 miliar masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar Rp. 297,8 miliar. Selain itu, dinamika politik dalam pembahasan APBD melibatkan negosiasi antara pemerintah daerah dan DPRD, yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan prioritas pembangunan lainnya.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa proses politik anggaran dalam perbaikan jalan di Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh faktor keterbatasan anggaran, skala prioritas pemerintah daerah, serta kepentingan politik dalam pengambilan keputusan. Diharapkan adanya peningkatan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran guna memastikan perbaikan infrastruktur yang lebih optimal.

Kata Kunci: Politik Anggaran, APBD, Infrastruktur, Perbaikan Jalan, Kabupaten Indragiri Hulu

ABSTRACT

This study discusses the dynamics of budget politics in the process of preparing the 2023 Indragiri Hulu Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), especially regarding the budget allocation for repairing damaged roads. The budget is a crucial aspect in local government policy, where its formulation involves various political interests. This study aims to analyze the budget politics process involving the executive and legislative in determining budget priorities, as well as the obstacles faced in implementing road infrastructure repair policies.

This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through interviews with related parties, such as members of the Regional People's Representative Council (DPRD), the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), and analysis of policy documents. The results of the study show that budget constraints are the main challenge in realizing road repairs, where the funds allocated of IDR 51.9 billion are still far from the ideal need of IDR 297.8 billion. In addition, the political dynamics in discussing the APBD involve negotiations between the local government and the DPRD, which are often influenced by political interests and other development priorities.

The conclusion of this study confirms that the budget politics process in road repairs in Indragiri Hulu Regency is influenced by factors of budget limitations, local government priority scales, and political interests in decision making. It is hoped that there will be increased transparency, efficiency, and effectiveness in budget management to ensure more optimal infrastructure repairs.

Keywords: Budget Politics, APBD, Infrastructure, Road Repairs, Indragiri Hulu Regency

- **Latar Belakang masalah**

Kekurangan dana sebesar Rp 51,9 miliar untuk perawatan jalan di Kabupaten Indragiri Hulu disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan jalan yang dialami di daerah tersebut. Selain itu, masih ada beberapa bagian jalan yang belum mendapatkan aspal, dengan total panjang mencapai 1.489,299 km, mencakup berbagai tingkat kerusakan dari yang ringan hingga parah. Sementara itu, jumlah ideal yang diperlukan untuk memperbaiki semua jalan yang rusak diperkirakan mencapai Rp 297.859.800.800,-

Kondisi jalan yang rusak merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu. Sampai saat ini, penanganan jalan yang rusak di kabupaten ini masih belum mencapai hasil yang optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah proses politik anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah "Apa dinamika politik anggaran dalam penyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2023?"

- **Pembahasan**

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran mencakup proses konsultatif anggaran dengan lembaga perwakilan secara terbuka, serta publikasi hasilnya. Pejabat negara perlu pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, berbasis kinerja.

Dalam praktik, tarik ulur kepentingan antara DPRD dan Dinas PUPR dilakukan dengan mendengarkan aduan masyarakat tentang jalan rusak. Prioritas diberikan pada jalan yang rusak berat. Namun, ada juga dewan yang menyatakan tarik ulur bisa terjadi karena dewan tidak menang di wilayah dapil yang mengalami kerusakan tersebut. Menurut Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan pemerintah mengenai informasi pengelolaan sumber daya publik yang penting untuk pengambilan keputusan.

Menurut Nasirah (2016), akuntabilitas adalah alat untuk kontrol dalam mencapai hasil pelayanan publik. Evaluasi kinerja penting untuk mengetahui pencapaian dan metode yang digunakan. Pengendalian dalam manajemen harus didukung oleh akuntabilitas yang baik, dan akuntabilitas mencerminkan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sampai pencapaian tujuan.

Penjelasan terkait akuntabilitas dalam pernyataan tersebut mencakup beberapa aspek:

1. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Setelah anggaran untuk perbaikan jalan dibahas dan disahkan dalam rapat DPRD, mereka meningkatkan fungsi pengawasan. Ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya berperan dalam menetapkan kebijakan anggaran tetapi juga memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
2. Transparansi dalam Pelaksanaan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk turut serta dalam mengawasi proses perbaikan jalan. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi, di mana informasi terkait proyek infrastruktur dapat diakses dan dikritisi oleh publik.
3. Tanggung Jawab terhadap Penggunaan Anggaran Dengan adanya pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, DPRD memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui benar-benar digunakan untuk perbaikan jalan yang dimaksud. Ini mencegah potensi penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak efektif.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Akuntabilitas Publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menegaskan bahwa siapa saja dapat mengawasi jalannya proyek perbaikan jalan. Ini menandakan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, yang merupakan bagian dari mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemantauan dan penilaian adalah dua fungsi manajemen yang saling berhubungan. Dalam praktiknya,

monitoring sering diasosiasikan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan suatu aktivitas yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi biasanya dipahami sebagai penilaian terhadap hasil dari aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi yang memastikan agar semua tugas yang sedang dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, evaluasi adalah proses untuk mengukur dan membandingkan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Pengawasan tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal tanpa pelaksanaan fungsi pengawasan.

Secara umum, pernyataan ini mengindikasikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab tidak hanya pada pengambilan keputusan, tetapi juga dalam memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat. Ini menguatkan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan pemerintahan.

2. Disiplin Anggaran

Dalam proses pembahasan penganggaran terdapat aspek disiplin anggaran, menurut Madiasmo (2008) Disiplin anggaran adalah upaya memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara konsisten dengan aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana (Reza Nanda et al., 2016).

Sementara, terkait hal ini menurut Arifin yang merupakan yang merupakan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu periode 2019-2024 mengatakan bahwa:

“Terkait disiplin anggaran kami dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten Indragiri Hulu ingin adanya efisiensi, kami tidak ingin lagi penggunaan anggaran anggaran yang sifatnya yang tidak berguna bagi kebutuhan masyarakat terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan. Jika ada angka anggaran yang membengkak dan setelah dikoreksi oleh Badan Anggaran (BANGGAR) anggaran itu dirasa tidak perlu maka angka anggaran tersebut akan dilakukan penekanan anggaran untuk perbaikan jalan rusak, tetapi pengkoreksian anggaran ini tetap harus melakukan diskusi dengan pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).” (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Januari di Kedai Kopi Bengkalis Pekanbaru Tahun 2025).

Menurut Hendrik, SE yang merupakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indragiri Hulu mengatakan bahwa: *“Proses politik anggaran atau tarik ulur kepentingan yang terjadi dalam menentukan atau membahas anggaran terkait perbaikan jalan rusak di kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2023 ini dilakukan sebanyak 2 kali pembahasan yaitu membahas pada APBD Murni dan APBD Perubahan. Pembahasan ini untuk menentukan skala prioritas penanganan jalan rusak yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu di tahun 2023”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari di Kantor PUPR Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Efisiensi dan Disiplin Anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting. Ketua DPRD menyatakan bahwa mereka mengharapkan adanya efisiensi dalam

penggunaan anggaran. Anggaran yang dianggap tidak relevan atau berlebihan akan dikoreksi oleh Badan Anggaran (BANGGAR) untuk mencapai optimalisasi. Apabila terdapat pos anggaran yang dianggap kurang penting, dana tersebut akan disalurkan pada prioritas utama, yaitu perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Serta prosedur Koreksi selalu melibatkan pembicaraan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berfungsi sebagai pelaksana teknis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan anggaran perbaikan kerusakan jalan pada tahun 2023 sebesar Rp. 32.628.161.539 Tarik Ulur Kepentingan dalam Politik Anggaran Pernyataan Hendrik, SE, menegaskan bahwa dalam pembahasan anggaran terjadi proses negosiasi atau tarik ulur kepentingan, yang dilakukan dalam dua tahap:

- o APBD Murni: Penyusunan awal anggaran yang sudah mencakup rencana perbaikan jalan.
- o APBD Perubahan: Revisi atau penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan baru yang muncul di pertengahan tahun.
- o Proses ini dilakukan untuk memastikan skala prioritas dalam penanganan jalan rusak sesuai dengan urgensi dan kondisi di lapangan.
- o Keterkaitan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penyusunan Anggaran
- o Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam mengawasi, mengoreksi, dan memastikan efisiensi anggaran agar tidak ada pemborosan atau penggunaan yang tidak relevan.

- o Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pelaksana teknis bertanggung jawab dalam menyusun rencana teknis serta menentukan skala prioritas proyek perbaikan jalan.
- o Keduanya harus bekerja sama dalam menyelaraskan antara perencanaan teknis dan penganggaran politik, sehingga dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang paling mendesak.

Terdapat hubungan erat antara disiplin anggaran dan tarik ulur kepentingan dalam proses penganggaran perbaikan jalan di Indragiri Hulu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menekankan efisiensi dan koreksi anggaran agar lebih tepat guna, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan bahwa pembahasan dilakukan dalam dua tahap untuk menentukan prioritas. Kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sangat penting dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.

3. Keadilan Anggaran

Kesenjangan antara Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Kebijakan untuk Perbaikan Jalan yang Rusak di Kabupaten Indragiri Hulu. Meskipun perbaikan infrastruktur jalan merupakan bagian dari Visi dan Misi Bupati, pelaksanaan yang sebenarnya masih belum berjalan dengan baik, terlihat dari banyaknya jalan yang dalam kondisi buruk dan kurangnya tindakan cepat dari lembaga terkait. Diperlukan komitmen yang lebih kuat, pengelolaan anggaran yang efisien, serta pengawasan yang ketat agar program perbaikan jalan dapat terwujud sesuai dengan visi pengembangan daerah.

Dalam regulasi perbaikan jalan rusak di Kabupaten Indragiri Hulu mestinya di implementasikan melalui perencanaan yang matang eksekutor sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan, serta melalui pada regulasi pembangunan yang telah di amanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004.

Hukum ini secara tegas mengungkapkan bahwa salah satu sasaran dari sistem perencanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa sistem perencanaan pembangunan fokus pada pendekatan yang melibatkan masyarakat, yang sering disebut sebagai perencanaan yang melibatkan partisipasi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah pada bab X tentang pembangunan daerah, pasal 261 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan metode teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Selain itu, pasal 262 ayat (1) mengatakan bahwa rencana pembangunan daerah yang dimaksud dalam pasal 260 ayat (2) disusun dengan cara yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, adil, dan ramah lingkungan.

4. Efektifitas dan Efisiensi

Untuk mengatasi kebuntuan dalam menyalurkan harapan masyarakat mengenai dana, aspirasi ini perlu didorong secara politik melalui lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya untuk mendukung penganggaran politik ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas proses reses DPRD dalam mendengarkan keinginan masyarakat. Harapan yang terkumpul kemudian bisa dibawa ke dalam diskusi tim anggaran legislatif sebagai

usulan dari daerah pemilihan. Tentu saja, proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan dukungan atau pendampingan terhadap hasil-hasil Musrenbang yang berasal dari masyarakat. Penyaringan dari aspirasi melalui proses penyerapan reses dapat dirancang menjadi program unggulan untuk masing-masing daerah pemilihan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi oleh DPRD.

Menurut Elda Suhanura SH, MH, yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu periode 2019-2024 mengatakan bahwa:

“Jika DPRD dapat mengefektifkan proses reses untuk membangun usulan-usulan prioritas program, didalam dokumen APBD, persoalan menjawab kebutuhan konstituen cukup dilakukan lewat perencanaan instansi teknis baik Dinas di tingkat daerah atau Departemen di tingkat pusat. Dengan demikian, dana aspirasi tidak perlu dianggarkan sendiri untuk dibelanjakan oleh anggota DPRD melainkan dapat dialokasikan langsung lewat mekanisme politik ke dalam program-program instansi pemerintah. Proses ini akan lebih ideal lagi jika Partai Politik dan Politisi dapat membangun kekuatan pemilih sedemikian rupa sehingga dapat mendorong akuntabilitas dan kemandirian Partai Politik di setiap tingkatan. Banyaknya usulan yang dapat dijawab akan semakin meningkatkan popularitas politik partai dimata konstituen”
(Wawancara dilakukan di Kedai kopi bengkalis pada tanggal 24 Januari tahun 2024)

Berdasarkan uraian wawancara diatas diketahui bahwa pentingnya efektivitas reses dalam menyusun program prioritas yang bisa langsung masuk ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan cara ini, kebutuhan konstituen bisa diakomodasi melalui perencanaan instansi teknis, baik di

tingkat daerah maupun pusat, tanpa perlu dana aspirasi yang dikelola langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain itu, pemimpin DPRD juga menegaskan bahwa sejatinya sistem politik yang lebih ideal terwujud apabila partai-partai politik dan para pembuat kebijakan dapat menciptakan pangkalan pemilih yang kokoh. Hal ini akan membuat mereka lebih bertanggung jawab serta mandiri dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Jika semakin banyak usulan dari masyarakat yang dapat diimplementasikan melalui jalur resmi, maka reputasi partai politik di kalangan publik pun akan meningkat.

Dari pernyataan tersebut, terlihat adanya upaya untuk memperkuat sistem politik yang lebih jelas, efisien, dan berdasarkan perencanaan yang matang, dibanding sekadar memberikan dana aspirasi yang mungkin kurang terarah. Ini juga merupakan tantangan bagi DPRD dan partai politik dalam menciptakan komunikasi serta mekanisme kerja yang lebih baik untuk memenuhi aspirasi rakyat. Dalam praktiknya, dan pada kenyataannya, masih banyak suara masyarakat yang tidak sepenuhnya didengar oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Indragiri Hulu. Sebab, hingga penulis melakukan penelitian ini, masih banyak kerusakan infrastruktur, termasuk jalan yang tergolong parah, meskipun beberapa lokasi dan ruas jalan telah diperbaiki di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Menurut Rudi Walker Purba dari Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia, ia menyatakan bahwa:

“PT DPM ini mengerjakan dua proyek jalan di Indragiri Hulu. Dimana keduanya bernilai miliaran rupiah, bahkan proyek yang satunya mencapai lebih dari Rp 11 miliar. Namun, penggunaan material dari kuari ilegal membuat kita meragukan proses

lelangnya," (Dilansir dari media catatanriau)

Dalam pandangan efisiensi S. P. Hasibuan, tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan usaha untuk mencapai hasil yang optimal meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Penetapan prioritas dalam perbaikan jalan, dari kondisi yang paling ringan hingga yang parah, mencerminkan strategi yang tepat dalam pengalokasian anggaran untuk memberikan manfaat maksimal bagi komunitas.

Pendekatan ini juga menunjukkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran publik, di mana perencanaan yang baik dan melibatkan partisipasi dapat mengurangi kemungkinan pemborosan serta memastikan bahwa infrastruktur yang diperbaiki memiliki dampak signifikan terhadap mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Effendi (2012: 35) berpendapat bahwa efektivitas lebih berkaitan dengan hasil keluaran sementara masalah penggunaan masukan kurang mendapat perhatian utama. Jika efisiensi dihubungkan dengan efektivitas, maka meskipun ada peningkatan dalam efektivitas, tidak selalu berarti efisiensi juga meningkat (Lau, 2023). Efektivitas menurut Sedarmayanti (2012: 89) mencerminkan tingkat pencapaian atau kelebihan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan serta adanya hubungan antara nilai-nilai yang berbeda.

Dalam Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran, disebutkan bahwa pengeluaran untuk pembangunan jalan kelas 3 berkisar antara Rp6,5 miliar hingga Rp7 miliar per kilometer. Angka ini sudah termasuk PPN 11%, penggunaan material berkualitas, dan alat berat. Jika dilihat dari standar biaya pembangunan jalan di Indonesia, angka ini masih berada dalam rentang yang bisa diterima, tergantung pada kondisi lahan dan spesifikasi konstruksi yang ada. Namun, tanpa adanya data

pembandingan dari lokasi lain yang memiliki karakteristik yang sama, sulit untuk memastikan apakah biaya ini adalah yang paling efektif. Di sisi lain, pada tahun 2023, 116 ruas jalan diperbaiki dengan panjang total 116,92 km, sementara panjang total jalan kabupaten mencapai 1.593,61 km. Artinya, hanya sekitar 7,34% dari total jalan kabupaten yang mendapatkan perbaikan dalam satu tahun, yang menunjukkan kemungkinan adanya keterbatasan anggaran atau adanya ruang untuk meningkatkan efisiensi.

Analisis Efisiensi dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten menggunakan Musrenbang Kabupaten untuk menentukan prioritas dalam perbaikan jalan. Proses ini bersifat partisipatif, yang seharusnya bisa meningkatkan efisiensi karena sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun, tidak ada penjelasan mengenai cara pemilihan ruas jalan tersebut. Jika prioritas ditentukan hanya berdasarkan tingkat kerusakan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan mobilitas masyarakat, maka efisiensinya patut dipertanyakan. Selain itu, tidak ada penjelasan mengenai adanya mekanisme pengawasan terhadap kualitas hasil perbaikan. Tanpa adanya sistem evaluasi yang memadai, ada kemungkinan besar anggaran besar tidak menghasilkan perbaikan jalan yang tahan lama, yang dapat menyebabkan kebutuhan untuk perbaikan yang berulang (inefisiensi jangka panjang). Untuk menilai apakah pernyataan dari pihak Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu terkait efektivitas perbaikan jalan tepat atau tidak, kita perlu memahami makna efektivitas. Efektivitas berhubungan dengan sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, jika tujuan utama dari perbaikan jalan adalah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan

mobilitas masyarakat, maka efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana proyek ini berhasil memenuhi kebutuhan tersebut.

Fungsi penganggaran adalah tanggung jawab DPRD yang berhubungan dengan perencanaan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam rencana perbaikan jalan yang rusak di Indragiri Hulu, DPRD menjadi aktor utama dalam proses diskusi, yang terlihat dalam Musrenbang yang berlangsung pada tahun 2023 di Kecamatan Kelayang. Dalam acara tersebut, Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, SE hadir dan beberapa masukan yang telah diintegrasikan dalam anggaran tahun 2023 akan dilaksanakan tahun ini. Sumber informasi ini diambil dari berita ([LAMANRIAU.com](https://lamanriau.com), 2023).

Fungsi anggaran merupakan peran yang peka dan sering kali menjadi tempat terjadinya kesalahan serta penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan dua elemen pemerintahan daerah tersebut. Dengan adanya peran ini dapat terjalin suatu keseimbangan antara aktivitas pemerintah daerah dan DPRD dalam hal penganggaran dan perencanaan pembangunan, serta kinerja DPRD yang diharapkan sangat penting di sini karena memiliki koneksi yang besar dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.

- **Kesimpulan**

Dinamika politik terkait penganggaran untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023 dipengaruhi oleh keterbatasan dana, prioritas pembangunan yang ditetapkan, serta konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan DPRD. Meskipun kerusakan jalan menjadi isu utama yang mempengaruhi perekonomian dan mobilitas masyarakat, anggaran yang tersedia untuk perbaikan masih jauh dari angka yang dibutuhkan.

Proses perencanaan dan penyusunan

anggaran mencakup berbagai tahap, yang termasuk negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Faktor politik sering kali berperan dalam memengaruhi keputusan terkait alokasi anggaran, di mana kepentingan politik tertentu dapat merubah prioritas pembangunan. Tantangan utama dalam pengelolaan anggaran adalah transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas, sehingga dana yang ada dapat digunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem penganggaran, peningkatan akses informasi dalam proses perencanaan, dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Reza Nanda, Darwanis, & Kuala. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol.1, No.(01), 327-340
- Lau, E. A. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Melalui Pemanfaatan Runout Time (Rot) Method. *Exhall Jurnal*, 5(1), 1–11.
- LAMANRIAU.com. (2023). *Musrenbang Kecamatan Kelayang Tahun 2023 Dihadiri Bupati Inhu*. <https://lamanriau.com/>.